

DETERMINAN EFEKTIVITAS PENGARUH KEBIJAKAN DESENTRALISASI FISKAL TERHADAP KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH SERTA DAMPAKNYA PADA PERTUMBUHAN EKONOMI DAERAH (Studi Kasus: Kabupaten/Kota di Jawa Tengah)

Sumardi

Staf Pengajar Jurusan Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Sebelas Maret Surakarta
swmardi151@gmail.com

Abstract

Various studies on the effects of fiscal decentralization policy as a representation of the implementation of regional autonomy policies do not have a definitive answer to the region's economic growth. This study is intended to find the answer to how the effectiveness of the influence of performance-based budget policy changes at the level of fiscal capacity, fiscal decentralization and local expenditure structure and then the impact is on regional economic growth in the District/City in Central Java Province.

Panel data analysis of the 35 districts/cities in Central Java during the period 2001 to 2010 shows that: (i) the Regional Financial ability effects positively on economic growth, (ii) Fiscal Decentralization parabolic effects (hump-shaped relation) on economic growth areas where the situation is still low fiscal decentralization positive effect on economic growth, but after reaching its highest point, the effect of fiscal decentralization on economic growth is negative, (iii) Expenditure Structure positively effects on regional economic growth, (iv) Performance-Based Budget Policy Changes influence the level of local financial capacity of the different economic growth, (v) Performance-Based Budget Policy Changes cause the financial ability to influence economic growth lower, (vi) Performance-Based Budget Policy Changes do not lead to changes in local financial capacity to influence regional economic growth. It is recommended that the district/city in Central Java to: (i) improve the financial capability through forming components such as the Regional Local Taxes, Levies, Property Management Results Separated Regions and Other Legal PAD, (ii) increase the expenditure structure of the District/City by increasing the proportion of public expenditure or direct spending and improve efficiency of the indirect expenditure.

Keywords: *Fiscal Decentralization, Regional Financial Capability, Economic Growth*

Abstrak

Berbagai penelitian tentang efek kebijakan desentralisasi fiskal sebagai representasi implementasi kebijakan otonomi daerah belum memiliki jawaban pasti hubungannya dengan peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah. Penelitian ini dimaksudkan untuk mencari jawaban bagaimana efektivitas pengaruh perubahan kebijakan anggaran berbasis kinerja pada tingkat kemampuan keuangan daerah, desentralisasi fiskal dan struktur belanja daerah dan kemudian dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi daerah di Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah.

Analisis data panel terhadap 35 Kabupaten/Kota di Jawa Tengah selama kurun waktu 2001 – 2010 menunjukkan bahwa: (i) Kemampuan keuangan daerah berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi daerah, (ii) Desentralisasi Fiskal berpengaruh secara parabolik (*hump-shape relation*) terhadap pertumbuhan ekonomi daerah dimana pada situasi desentralisasi fiskal masih rendah berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi, tetapi setelah mencapai titik tertinggi, pengaruh desentralisasi fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi negatif, (iii) Struktur Belanja Daerah berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi daerah, (iv) Perubahan Kebijakan Anggaran Berbasis Kinerja menyebabkan pengaruh tingkat kemampuan keuangan daerah terhadap pertumbuhan ekonomi yang berbeda, (v) Perubahan Kebijakan Anggaran Berbasis Kinerja menyebabkan pengaruh kemampuan keuangan daerah terhadap pertumbuhan ekonomi menjadi lebih rendah, (vi) Perubahan Kebijakan Anggaran berbasis Kinerja tidak menyebabkan perubahan pengaruh kemampuan keuangan daerah terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Maka disarankan agar Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah untuk: (i) meningkatkan kemampuan keuangan daerah melalui komponen-komponen pembentuk Pendapatan Asli Daerah seperti Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan Lain-lain PAD yang Sah, (ii) Meningkatkan struktur belanja daerah Kabupaten/Kota dengan meningkatkan proporsi belanja publik atau belanja langsung dan melakukan efisiensi terhadap belanja tidak langsung.

Kata kunci: Desentralisasi Fiskal, Kemampuan Keuangan Daerah, Pertumbuhan Ekonomi

PENDAHULUAN

Sejak tahun 1966, Pemerintah Orde Baru (Orba) telah membangun suatu pemerintahan nasional yang kuat dengan menempatkan stabilitas politik sebagai landasan untuk mempercepat pembangunan ekonomi Indonesia. Kenyataan menunjukkan bahwa pemerintah Orba telah berhasil dalam melenyapkan *hyperinflasi*, mengubah modal yang mengalir ke luar negeri (*capital outflow*) menjadi arus masuk modal swasta yang substansial, mengubah defisit cadangan devisa menjadi selalu positif, mempertahankan harga beras dan meningkatkan produksi beras sampai pada tingkat swasembada, menciptakan pertumbuhan ekonomi (*economic growth*) yang berkelanjutan, dan menurunkan jumlah penduduk yang berada dalam garis kemiskinan.

Prestasi politik dan ekonomi yang mengesankan itu telah ditopang dengan kontrol dan inisiatif program pembangunan dari pusat (Kuncoro, 1995:3).

Sejarah perekonomian mencatat desentralisasi telah muncul ke permukaan sebagai paradigma baru dalam kebijakan dan administrasi pembangunan sejak dasawarsa 1970-an. Tumbuhnya perhatian terhadap desentralisasi tidak hanya dikaitkan dengan gagalnya perencanaan terpusat dan populernya strategi pertumbuhan dengan pemerataan (*growth with equity*), tetapi juga adanya kesadaran bahwa pembangunan adalah suatu proses yang kompleks dan penuh ketidakpastian yang tidak dapat dengan mudah dikendalikan dan direncanakan dari pusat. Karena itu dengan penuh keyakinan para pelopor desentralisasi mengajukan sederet panjang alasan dan argumen tentang pentingnya desentralisasi dalam perencanaan dan administrasi di negara Dunia Ketiga.

Pasal 18 UUD 1945, dan UU Nomor 5 Tahun 1974 serta UU Otonomi Daerah Nomor 22 Tahun 1999, menjamin adanya desentralisasi – otonomi baik di daerah besar maupun daerah kecil (Provinsi dan Kota/Kabupaten). Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah telah meletakkan dasar sistem hubungan pusat-daerah yang dirangkum dalam tiga prinsip: desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas perbantuan (*medebewind*). Akibat prinsip-prinsip ini, dikenal adanya daerah otonom dan wilayah administratif. Daerah Tingkat I atau Daerah Tingkat II sebagai sebutan daerah otonom sering diidentikkan dengan Provinsi atau Kota/Kabupaten yang merupakan wilayah administratif.

Titik berat desentralisasi di Indonesia menurut UU No. 5/1974 adalah Pemerintah Kabupaten/Kota. Dasar pertimbangannya adalah: *Pertama*, dari dimensi politik, Pemerintah Kabupaten/Kota dipandang kurang mempunyai fanatisme kedaerahan sehingga resiko gerakan separatisme dan peluang berkembangnya aspirasi federalis secara relatif menjadi minim. *Kedua*, dari dimensi administratif, penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat relatif dapat lebih efektif. *Ketiga*, Pemerintah Kabupaten/Kota adalah daerah "ujung tombak" pelaksanaan pembangunan sehingga Pemerintah Kabupaten/Kota-lah yang lebih mengetahui kebutuhan dan potensi rakyat di daerahnya. Pemerintah Kabupaten/Kota itu juga yang kemudian dapat meningkatkan *local accountability* pemerintah daerah terhadap rakyatnya.

Atas dasar itulah prinsip otonomi yang dianut, yaitu otonomi yang nyata, bertanggungjawab, dan dinamis, diharapkan dapat lebih mudah direalisasikan. "Nyata" berarti otonomi secara nyata diperlukan sesuai dengan situasi dan kondisi di daerah. "Bertanggungjawab" mengandung arti pemberian otonomi diselaraskan atau diupayakan untuk memperlancar pembangunan di seluruh pelosok tanah air. "Dinamis" berarti pelaksanaan otonomi selalu menjadi sarana dan dorongan untuk lebih baik dan maju (Kuncoro, 1995:4).

Namun di sisi lain, menurut Warsito Utomo nampaknya terlalu berlebihan jika muncul ketakutan bahwa otonomi di tingkat provinsi akan lebih memicu disintegrasi daripada di tingkat Kabupaten/Kota, sebaliknya tidak tepat apabila dikatakan bahwa meskipun Kabupaten/Kota merupakan daerah yang paling dekat dengan yang

dilayani (masyarakat) tetapi Kabupaten/Kota dianggap tidak memiliki sumber daya yang cukup baik secara kuantitas maupun kualitas untuk melaksanakan otonomi daerah (Utomo, 1999).

Permasalahan yang muncul kini adalah meskipun harus diakui bahwa UU No. 5/1974 adalah suatu komitmen politik, namun dalam praktek, yang terjadi selama ini adalah sentralisasi (kontrol dari pusat) yang dominan baik dalam hal perencanaan maupun implementasi pembangunan Indonesia. Materi pokok otonomi daerah sesuai dengan UU No. 5/1974 selama ini, cenderung lebih dititikberatkan pada efisiensi manajemen pemerintahan. Sedangkan aspek yang mendorong demokratisasi masih belum dikembangkan. Hal ini antara lain terlihat dari kedudukan DPRD sebagai unsur pemerintahan di daerah (Ahmadjayadi, 2000:2-4).

Kritik lain pelaksanaan otonomi berdasarkan UU No. 5/1974 itu adalah bahwa penyerahan urusan lebih diarahkan pada hal yang bersifat administratif tanpa diiringi upaya memadai dalam pemberian insentif yang memungkinkan pemerintah Daerah dan masyarakat bergairah untuk melakukan upaya peningkatan ekonomi di daerahnya sehingga Pendapatan Asli Daerah (PAD) sulit ditingkatkan.

Perjalanan otonomi daerah kemudian berlanjut dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, sebagai desakan reformasi dan akibat pengaruh perkembangan lingkungan strategis baik nasional maupun internasional. Undang-Undang otonomi daerah itu disempurnakan menjadi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. UU itu mengatur pembagian kewenangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (*power sharing*) dan sekaligus disertai dengan perimbangan keuangannya (*financial sharing*).

Salah satu fenomena paling menonjol dari hubungan antara sistem Pemda dengan pembangunan adalah ketergantungan Pemda yang sangat tinggi terhadap pemerintah pusat. Ketergantungan ini jelas terlihat dari aspek keuangan. Pemda kehilangan keleluasaan bertindak (*local discretion*) untuk mengambil keputusan penting, dan adanya campur tangan pemerintah pusat yang tinggi terhadap Pemda. Sehubungan dengan masalah ketergantungan fiskal Pemda yang tinggi, Suparmoko (1992) menyebutkan beberapa alasan tingginya derajat sentralisasi keuangan di negara sedang berkembang antara lain: (i) lemahnya kemampuan administrasi di tingkat pemerintah daerah, (ii) besarnya perbedaan situasi dan kondisi antar berbagai daerah, (iii) perlunya kekuasaan pusat yang kuat untuk mengurangi adanya gerakan-gerakan separatis, (iv) perlunya perencanaan nasional yang menyeluruh baik di bidang pembangunan sosial maupun ekonomi termasuk penyediaan prasarana komunikasi transportasi, irigasi yang semuanya sangat vital bagi perkembangan ekonomi suatu negara (Suparmoko, 1992).

Isu desentralisasi di Indonesia ini sedikit banyak juga disebabkan karena faktor perkembangan pembangunan di berbagai negara lain di dunia yang mencapai

keberhasilan dalam pembangunan perekonomiannya dan mencapai pemerataan antar regional secara lebih cepat di negaranya, setelah menerapkan sistem desentralisasi. Sebagai contoh, Jepang menunjukkan pembangunan yang lebih cepat dan seimbang setelah dilaksanakannya Rencana Pembangunan Total Nasional di tahun 1970, dengan target utama pembangunan nasionalnya adalah pengembangan yang seimbang antar daerah (Hotta, 2000). Negara-negara Eropa mencapai pemerataan yang baik dalam pembangunannya juga setelah melakukan pembangunan yang lebih berorientasi kepada pemerintah lokal (Amstrong & Taylor, 1993) dan Amerika Serikat dengan sistem negara federalismenya (*Committee for Economic Development*, 1996).

Laporan Bank Dunia menyebutkan adanya tiga alasan dibutuhkannya desentralisasi bagi masyarakat, yaitu: (i) tuntutan pasar dan teknologi untuk pengembangan industri bukan lagi pada pemerintah yang bersifat terpusat tetapi lebih kepada pemerintah lokal yang mampu menyediakan tuntutan pasar, (ii) perubahan politik telah membawa makin kuatnya perwujudan keinginan masyarakat lokal, dan (iii) pengalaman berbagai menunjukkan bahwa mereka telah berpaling ke pemerintahan lokal manakala pemerintah pusat tidak mampu menyediakan jasa penting masyarakat (World Bank, 1997:121).

Sejalan dengan pemikiran di atas, pemerintah menyadari bahwa pembangunan daerah merupakan salah satu upaya untuk mencapai tujuan masyarakat adil dan makmur. Sejalan dengan tujuan tersebut, sebetulnya selama ini berbagai kegiatan pembangunan telah diarahkan pada pembangunan daerah khususnya daerah-daerah yang relatif tertinggal.

Salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur keberhasilan pembangunan ekonomi suatu daerah adalah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), yang merupakan keseluruhan nilai tambah barang dan jasa yang dihasilkan oleh berbagai sektor ekonomi di suatu daerah dalam periode tertentu, biasanya satu tahun. Kinerja perekonomian setiap daerah dapat diukur dengan pertumbuhan ekonomi daerah (laju pertumbuhan PDRB menurut harga konstan).

Provinsi Jawa Tengah merupakan salah satu wilayah provinsi di Indonesia yang memiliki kemampuan keuangan daerah relatif tinggi, bahkan dari urutan terbesar pada tahun 2006, provinsi ini menempati urutan keempat, setelah Provinsi Jawa Barat, Provinsi Banten, dan Provinsi Jawa Timur. Pada tahun itu hanya ada 8 (delapan) provinsi dari seluruh wilayah Indonesia yang memiliki derajat kemampuan keuangan daerah lebih dari 50 persen. Derajat kemampuan keuangan daerah itu diukur dengan indikator derajat desentralisasi fiskal, yaitu rasio atau perbandingan antara Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap total Pendapatan Daerah. Berdasarkan kriteria Prof. Abdul Halim dari Kursus Keuangan Daerah (KKD) Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, suatu daerah dikatakan memiliki derajat kemampuan keuangan daerah yang tinggi apabila memiliki derajat desentralisasi fiskal lebih besar dari 50 persen, dan sebaliknya jika daerah memiliki derajat desentralisasi fiskal 50 persen ke bawah dikatakan bahwa daerah itu memiliki derajat kemampuan keuangan daerah yang rendah.

Secara umum di Indonesia jauh sebelum pelaksanaan otonomi daerah, realitas hubungan fiskal antara pusat-daerah ditandai dengan tingginya kontrol pusat terhadap proses pembangunan di daerah. Hal itu jelas terlihat dari rendahnya proporsi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap total pendapatan daerah dibandingkan dengan besarnya subsidi (*grants*) yang diberikan Pemerintah Pusat. Indikator tingkat kemampuan keuangan daerah atau derajat desentralisasi fiskal yang diukur dari rasio antara PAD dengan total pendapatan daerah menunjukkan angka-angka jauh di bawah 50 persen. Dalam kurun waktu 1984/85-1990/91, proporsi PAD terhadap total pendapatan daerah di 27 provinsi di Indonesia rata-rata hanya 15,4 persen dan berturut-turut meningkat menjadi 26,24 persen dan 36,17 persen dalam tahun anggaran 1993/1994 dan tahun anggaran 1997/1998. Semua provinsi kecuali DKI Jakarta, mempunyai PAD kurang dari 50 persen. Artinya lebih banyak subsidi dari pusat dibandingkan dengan PAD dalam pembiayaan pembangunan daerah. Bila diperinci, PAD hanya membiayai pengeluaran rutin daerah kurang dari 30 persen, bahkan untuk daerah kabupaten/kota atau dahulu disebut Daerah Tingkat II kondisinya lebih buruk lagi, karena PAD hanya mampu membiayai pengeluarannya kurang dari 22 persen.

Ironisnya, meskipun titik berat otonomi daerah difokuskan pada daerah kabupaten/kota, namun kenyataannya justru daerah kabupaten/kota-lah yang paling tergantung pada sumbangan/bantuan atau dana perimbangan yang berasal dari pemerintah pusat. Sebagian besar kabupaten/kota di Indonesia, tepatnya 173 kabupaten/kota atau 59,25 persen dari total kabupaten/kota Indonesia, memiliki angka prosentase PAD terhadap total belanja daerah kurang dari 15 persen.

Setidaknya ada lima hal menyebabkan rendahnya PAD, sehingga pada gilirannya menyebabkan tingginya ketergantungan terhadap subsidi dari pusat, yaitu: *Pertama*, kurang berperannya badan usaha milik daerah atau perusahaan daerah sebagai sumber pendapatan daerah. *Kedua*, tingginya derajat sentralisasi dalam bidang perpajakan. Semua pajak utama, yang paling produktif dan *buoyant* baik pajak langsung maupun pajak tak langsung, ditarik oleh pusat. Penyebab *ketiga* adalah kendati pajak daerah cukup beragam ternyata hanya sedikit yang bisa diandalkan sebagai sumber penerimaan. Kemudian faktor *keempat* adalah faktor yang bersifat politis. Banyak kekhawatiran apabila daerah mempunyai sumber keuangan yang tinggi akan mendorong terjadinya disintegrasi dan separatisme. Dan *faktor terakhir* penyebab ketergantungan tersebut adalah kelemahan dalam pemberian subsidi pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Karena selama ini pemberian subsidi dalam bentuk blok (*block grants*) yang lebih memberikan keleluasaan Pemda untuk mengelolanya ternyata jumlahnya lebih kecil daripada subsidi spesifik (*specific grants*) yang penggunaannya sudah ditentukan oleh pusat.

Sementara itu pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jawa Tengah pada awal pelaksanaan otonomi daerah menunjukkan perkembangan yang relatif meningkat dibandingkan daerah-daerah sekitarnya di pulau Jawa. Data pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2001 – 2004 masing-masing adalah sebesar: 3,59 persen; 3,55 persen; 4,98 persen dan 5,13 persen. Sedangkan pertumbuhan ekonomi nasional pada

kurun waktu yang sama masing-masing adalah sebesar: 3,83 persen (2001); 4,38 persen (2002); 4,88 persen (2003), dan 5,13 persen (2004). Nampak bahwa pada 2 tahun pertama 2001 dan 2002 pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Tengah masih dibawah pertumbuhan ekonomi Nasional, pada tahun 2003 lebih tinggi dari Nasional, walaupun kemudian pada tahun 2004 pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Tengah itu sama dengan Nasional.

Selain lebih rendah dari pertumbuhan ekonomi Nasional pada tahun 2001 dan 2002, pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Tengah juga paling rendah dibandingkan 5 provinsi lainnya di pulau Jawa. Namun pada tahun 2003, pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Tengah yang tumbuh sebesar 4,98 persen itu menempati urutan tertinggi ketiga di pulau Jawa setelah Provinsi Banten (5,76 persen) dan DKI Jakarta (5,28 persen). Walaupun kemudian pada tahun 2004, pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Tengah ini sama dengan pertumbuhan ekonomi nasional dan berada pada urutan terendah kedua di wilayah pulau Jawa setelah Provinsi Jawa Barat.

Dengan kenyataan seperti di atas dan di tengah masalah pembangunan yang semakin kompleks, maka sudah selayaknya bahwa pendekatan pembangunan yang bersifat serba terpusat, departemental, pukol rata dan sektoral sudah semakin perlu ditinjau kembali. Tanpa adanya perubahan yang cukup mendasar dalam pola hubungan keuangan pusat-daerah, agaknya sulit membayangkan perbaikan ketimpangan pembangunan antar daerah. Sebab, diperkirakan jika pola pembangunan seperti sekarang ini masih dijalankan terus, dalam 25 tahun yang akan datang ketimpangan antar daerah akan semakin melebar. Lebih ironis lagi, pangsa PDRB dari daerah-daerah yang kaya sumber daya alam terhadap PDB akan mengalami kemerosotan. Untuk itulah sangat penting melakukan penelusuran sejauhmana efektivitas pengaruh kebijakan desentralisasi fiskal itu terhadap pertumbuhan ekonomi daerah dengan mempertimbangkan parameter-parameter keuangan daerah sejak dicanangkan implementasi otonomi daerah pada tahun 2001.

METODOLOGI PENELITIAN

Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah: (i) Analisis Deskriptif Kualitatif, dan (ii) Analisis Kuantitatif Inferensial. Analisis kuantitatif inferensial untuk membuktikan pengaruh desentralisasi fiskal, kemampuan keuangan daerah, struktur belanja daerah dan perubahan kebijakan anggaran berbasis kinerja berikut interaksinya terhadap pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di wilayah Provinsi Jawa Tengah. Alat analisis yang digunakan dalam pembuktian ini adalah alat analisis regresi berganda dengan data panel.

Data panel atau data longitudinal atau disebut juga data runtun waktu silang (*cross-sectional time series*) merupakan gabungan antara data silang (*cross section*), dalam hal ini banyak kabupaten/kota yang diamati, pada runtun waktu tertentu (*time series*), dalam hal ini selama tahun 2001 – 2010. Keuntungan data panel antara lain adalah dimungkinkannya mempelajari dinamika perubahan variabel-variabel individu/obyek

penelitian pada kurun waktu tertentu. Penerapan dalam penelitian ini adalah mengkaji perubahan variabel pertumbuhan ekonomi yang dipengaruhi oleh desentralisasi fiskal dan variabel-variabel keuangan daerah lainnya selama tahun 2001 – 2010.

Adapun model persamaan regresi yang dikembangkan dalam analisis regresi berganda data panel ini adalah:

Model Desentralisasi Fiskal Indikator Penerimaan:

$$G_{it} = a_{it} + b_1 \text{KKD} + b_2 \text{DFPDP} + b_3 \text{DFPDP}^2 + b_4 \text{BPUB} + b_5 \text{IMABK} + b_6 \text{KKDIMABK} + b_7 \text{BPUBIMABK} + e_{it} \dots\dots\dots (1)$$

Kemudian model Desentralisasi Fiskal Indikator Pengeluaran:

$$G_{it} = a_{it} + b_1 \text{KKD} + b_2 \text{LJDFB} + b_3 \text{LJDFB}^2 + b_4 \text{BPUB} + b_5 \text{IMABK} + b_6 \text{KKDIMABK} + b_7 \text{BPUBIMABK} + e_{it} \dots\dots\dots (2)$$

Model persamaan regresi berganda dalam penelitian ini menggunakan variabel *dummy* perubahan kebijakan Anggaran berbasis Kinerja (ABK). Variabel *dummy* merupakan variabel kategorik yang berharga nol atau satu. Variabel *dummy* disebut juga sebagai variabel indikator, biner, kategorik, kualitatif, boneka, atau variabel dikotomis. (Nachrowi, 2002:1987).

Analisis regresi dengan menggunakan data panel secara umum dapat digunakan beberapa teknik, yaitu: (i) Metode *Ordinary Least Square (OLS)* atau disebut metode *commont effect* atau koefisien tetap waktu dan individu. Metode ini tidak mempertimbangkan individu obyek penelitian dan waktu periodisasinya. Dengan demikian dalam model ini perilaku individu obyek penelitian diasumsikan sama dalam berbagai waktu. (ii) Metode *Fixed Effect* atau *slope/kemiringan konstan* dengan intersep berbeda antara individu obyek. Metode ini juga disebut model *Least Square Dummy Variable (LSDV)*. Intersep persamaan regresi model ini sama antar waktu tetapi berbeda antar indivisu obyek penelitian. *Slope* atau kemiringan persamaan regresi ini atau koefisien regresinya diasumsikan tetap antar individu obyek penelitian maupun antar waktu periodisasi penelitian. (iii) Metode *Random Effect* adalah metode regresi data panel dengan menambahkan variabel gangguan (*error-term*) yang mungkin saja akan muncul pada hubungan antar waktu dan antar obyek/individu. Metode *Ordinary Least Square (OLS)* pada teknis PLS atau *Common Effect* tidak dapat mendapatkan estimator yang efisien, sehingga lebih tepat untuk menggunakan teknik *Generalized Least Square (GLS)*.

HASIL PENELITIAN

1. Pemilihan Model

Teknik analisis PLS dan FEM menghasilkan koefisien regresi dan parameter lain persamaan regresi:

Variabel	Model PLS		Model FEM	
	Koef Regresi	Prob	Koef Regresi	Prob
C	-	-	4,060578	0,0003
KKD?	0,122600	0,0000	0,084838	0,0301
DFPDP?	44,39371	0,0000	-17,59373	0,3137

Variabel	Model PLS		Model FEM	
	Koef Regresi	Prob	Koef Regresi	Prob
DFPDP2?	-210,8021	0,0000	11,25985	0,8893
IMABK?	1,157916	0,0295	0,490861	0,3117
BPUB?	0,023337	0,0007	0,025311	0,0003
KKDIMABK	-0,020023	0,5978	-0,021895	0,5193
BPUBIMABK	-0,005993	0,7242	0,006406	0,6923
Adjusted R ² & DW stat	0,174452	0,83044	0,404380	1,316676
F-stat & Prob (F-stat)	-	-	6,779120	0,000000

Sumber: Data Primer, 2011, diolah.

Teknis analisis PLS dan FEM untuk model persamaan regresi pengeluaran menghasilkan parameter sebagai berikut:

Variabel	Model PLS		Model FEM	
	Koef Regresi	Prob	Koef Regresi	Prob
C	-	-	3,802666	0,0000
KKD?	0,124444	0,0000	0,097491	0,0100
LJDFB?	44,17657	0,0000	-23,57055	0,1035
LJDFB2?	-220,1822	0,0000	59,58602	0,4066
IMABK?	1,431779	0,0070	0,570297	0,2375
BPUB?	0,027417	0,0001	0,029620	0,0000
KKDIMABK	-0,017373	0,6517	-0,037312	0,2694
BPUBIMABK	-0,015820	0,3519	0,012156	0,4484
Adjusted R ² & DW stat	0,155726	0,824680	0,402395	1,308550
F-stat & Prob (F-stat)	-	-	6,731661	0,000000

Sumber: Data Primer, 2011, diolah.

2. Redundant Test

Hasil redundant test untuk memilih teknik analisis regresi PLS atau FEM pada model pengeluaran ini mendapatkan hasil *Cross-section F* sebesar 4,483828 dengan Probabilitas sebesar 0,0000 ($p < 0,01$) dan nilai *Cross-section Chi-Square* sebesar 140,736684 dengan Probabilitas sebesar 0,0000 ($p < 0,01$). Dengan demikian hipotesis nihil (H_0) yang menyatakan bahwa persamaan regresi lebih tepat menggunakan *common effect* atau PLS ditolak. Sedangkan hipotesis alternatif (H_1) yang menyatakan bahwa model persamaan regresi lebih tepat menggunakan FEM diterima. Hasil secara rinci redundant test dari kedua model regresi itu adalah sebagai berikut:

Test Efek	Model Penerimaan		Model Pengeluaran	
	Nilai Statistik	Prob	Nilai Statistik	Prob
Cross-section F	4,521041	0,0000	4,483828	0,0000
Cross-section Chi ²	141,697107	0,0000	140,736684	0,0000

Sumber: Data Primer, 2011, diolah.

Pemilihan model persamaan regresi teknis PLS dan FEM itu menggunakan redundant test dengan menguji hipotesis yang dinyatakan:

H0 : *Common Effect/Pooled Least Square*

H1 : *Fixed Effect Model*

Berdasarkan hasil pengolahan redundant test didapatkan nilai Cross-section F sebesar 4,521041 dengan Probabilitas 0,0000 ($p < 0,01$) dan nilai *Cross-section Chi-Square* sebesar 141,697107 dengan Probabilitas 0,0000 ($p < 0,01$). Dengan demikian uji F dan chi square dalam redundant test itu signifikan (meyakinkan) pada derajat signifikansi sebesar 1 persen, sehingga *H0* yang menyatakan bahwa model persamaan regresi menggunakan *common effect* atau PLS ditolak. Sedangkan hipotesis alternatif (*H1*) yang menyatakan bahwa model persamaan regresi yang lebih tepat adalah FEM diterima.

3. Hausman Test

Hausman test atau uji Hausman dalam penelitian ini digunakan untuk memilih teknis regresi FEM atau REM yang lebih tepat. Pernyataan hipotesis yang hendak diuji dalam Hausman test ini adalah sebagai berikut:

H0 : *Random Effect Model*

H1 : *Fixed Effect Model*

Teknik analisis FEM dan REM menghasilkan parameter-parameter regresi untuk model persamaan regresi penerimaan sebagai berikut:

Variabel	Model REM		Model FEM	
	Koef Regresi	Prob	Koef Regresi	Prob
C	2,437968	0,0026	4,060578	0,0003
KKD?	0,095547	0,0001	0,084838	0,0301
DFPDP?	6,135296	0,6452	-17,59373	0,3137
DFPDP2?	-54,45161	0,3985	11,25985	0,8893
IMABK?	0,729935	0,1237	0,490861	0,3117
BPUB?	0,021633	0,0011	0,025311	0,0003
KKDIMABK	-0,028091	0,3996	-0,021895	0,5193
BPUBIMABK	0,005715	0,7139	0,006406	0,6923
Adjusted R ² & DW stat	0,206551	1,104831	0,404380	1,316676
F-stat & Prob (F-stat)	13,97880	0,000000	6,779120	0,000000

Sumber: Data Primer, 2011, diolah.

Sedangkan teknik analisis FEM dan REM untuk model persamaan regresi pengeluaran menghasilkan parameter koefisien regresi dan parameter regresi lainnya sebagai berikut:

Variabel	Model REM		Model FEM	
	Koef Regresi	Prob	Koef Regresi	Prob
C	2,670571	0,0000	3,802666	0,0000
KKD?	0,090571	0,0002	0,097491	0,0100
LJDFB?	-0,114057	0,9919	-23,57055	0,1035
LJDFB2?	-19,39505	0,7412	59,58602	0,4066
IMABK?	0,808618	0,0867	0,570297	0,2375
BPUB?	0,022781	0,0006	0,029620	0,0000
KKDIMABK	-0,031743	0,3416	-0,037312	0,2694
BPUBIMABK	0,005528	0,7219	0,012156	0,4484
Adjusted R ² & DW stat	0,203158	1,097587	0,402395	1,308550
F-stat & Prob (F-stat)	13,71127	0,000000	6,731661	0,000000

Sumber: Data Primer, 2011, diolah.

Hasil pengolahan *Hausman test* mendapatkan nilai *Cross-section random* sebesar 19,249059 dengan Probabilitas sebesar 0,0074 ($p < 0,01$). Maka uji Hausman itu signifikan pada derajat signifikansi sebesar 1 persen sehingga hipotesis nihil (H_0) yang menyatakan bahwa model persamaan regresi penerimaan dengan teknik REM ditolak, dan menerima hipotesis alternatif (H_1) yang menyatakan bahwa teknis regresi yang lebih tepat adalah menggunakan FEM.

Demikian pula hasil pengolahan Hausman test untuk model persamaan regresi pengeluaran mendapatkan nilai *Cross-section random* sebesar 20,352131 dengan Probabilitas sebesar 0,0049 ($p < 0,01$). Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Hausman test itu signifikan pada derajat signifikansi sebesar 1 persen, sehingga menolak hipotesa nihil (H_0) yang menyatakan bahwa teknis regresi yang lebih tepat adalah REM, dan sebaliknya menerima hipotesis alternatif (H_1) yang menyatakan bahwa teknik regresi yang lebih tepat untuk model ini adalah FEM.

Secara rinci hasil Hausman test untuk kedua model persamaan regresi penerimaan dan pengeluaran itu adalah:

Test Random	Model Penerimaan		Model Pengeluaran	
	Nilai Statistik	Prob	Nilai Statistik	Prob
Cross-section Random	19.249059	0,0000	20,352131	0,0000

Sumber: Data Primer, 2011, diolah.

Nampak bahwa nilai DW-statistik kedua model persamaan (penerimaan dan pengeluaran) dengan teknik FEM itu berada pada daerah yang terdapat bukti terjadinya autokorelasi positif. Maka untuk menetralsir terjadinya autokorelasi itu dilakukan teknis *General Least Square* (GLS) terhadap kedua model persamaan regresi itu.

Penyusunan model persamaan regresi dengan teknik GLS ini selain dapat menetralsir penyimpangan juga mendapatkan kesalahan standar masing-masing koefisien regresi yang lebih efisien dibandingkan dengan teknik *common effect* atau PLS maupun teknik REM.

Variabel	Model Penerimaan		Model Pengeluaran	
	Koef Regresi	Prob	Koef Regresi	Prob
KKD?	0,121383	0,0000***	0,132727	0,0000***
DFPDP? - LJDFB?*	48,66769	0,0000***	45,95120	0,0000***
DFPDP2? - LJDFB2?*	-228,4478	0,0000***	-215,7784	0,0000***
IMABK?	0,661353	0,0349**	1,027737	0,0016***
BPUB?	0,018441	0,0000***	0,020791	0,0000***
KKDIMABK	-0,045663	0,0448**	-0,051227	0,0313**
BPUBIMABK	0,010301	0,2272	0,000519	0,9536
Adjusted R ² & DW stat	0,198816	1,954114	0,169260	1,943706
F-stat & Prob (F-stat)	-	-	-	-

Sumber: Data Primer, 2011, diolah.

Keterangan: **: Signifikan pada derajat signifikansi 5 persen.

***: Signifikan pada derajat Signifikansi 1 persen.

Model persamaan regresi dengan teknik GLS itu menghasilkan hampir semua variabel independent signifikan pada derajat signifikansi 5 persen atau bahkan 1 persen, dan hanya variabel interaksi antara BPUB dan IMABK yang tidak signifikan.

4. Pembahasan Persamaan Regresi

a) Pengaruh Desentralisasi Fiskal terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Bentuk persamaan regresi kuadratik pengaruh desentralisasi fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi pada kabupaten/kota di wilayah Provinsi Jawa Tengah merujuk pada model yang dikemukakan oleh Thiessen (2003) dan Akai (2007). Model persamaan regresi penerimaan kuadratik itu secara sederhana dapat dinyatakan sebagai:

$$G_{ij} = a + b_1 DFPDP + b_2 DFPDP^2$$

Hasil penyederhanaan persamaan regresi yang dapat menunjukkan hubungan model itu adalah:

$$G_{ij}=48,66769 DFPDP-228,4478 DFPDP^2$$

Pengaruh desentralisasi fiskal ini terhadap pertumbuhan ekonomi membentuk *hump-shape relation*, dimana pada saat desentralisasi fiskal masih rendah yaitu dibawah 0,106518 persen, pengaruh desentralisasi fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi positif. Namun setelah mencapai puncak desentralisasi fiskal itu, selanjutnya pengaruh desentralisasi fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi bersifat negatif. Artinya kalau desentralisasi fiskal sudah lebih dari 0,106518, maka peningkatan desentralisasi fiskal itu justru akan menurunkan pertumbuhan ekonomi.

Selanjutnya pada model persamaan regresi pengeluaran, model kuadratik yang dimaksud adalah:

$$G_{ij} = a + b_1 LJDFB + b_2 LJDFB^2$$

Hasil pengolahan model persamaan regresi pengeluaran itu adalah:

$$G_{ij} = 45,95120 LJDFB - 215,7784 DFPDP2$$

Pengaruh desentralisasi fiskal ini terhadap pertumbuhan ekonomi membentuk *hump-shape relation*, dimana pada saat desentralisasi fiskal masih rendah yaitu dibawah 0,106478 persen, pengaruh desentralisasi fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi daerah bersifat positif. Namun setelah desentralisasi mencapai puncak yaitu sebesar 0,106478 persen, selanjutnya pengaruh desentralisasi fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi justru bersifat negatif.

b) *Efektivitas Pengaruh Kemampuan Keuangan Daerah terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah*

Kemampuan keuangan daerah diukur dengan rasio Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan Total Pendapatan Daerah (TPD). Semakin tinggi KKD ini menunjukkan semakin meningkatkan peran Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai sumber-sumber pendapatan daerah. Pengaruh Kemampuan Keuangan Daerah terhadap pertumbuhan ekonomi adalah positif dan meyakinkan.

Dengan adanya perubahan kebijakan ABK ternyata tidak menambah efektivitas pengaruh KKD terhadap pertumbuhan ekonomi, artinya pengaruh KKD terhadap pertumbuhan ekonomi justru lebih kuat pada saat sebelum kebijakan ABK itu dirubah. Jadi pengaruh KKD terhadap pertumbuhan ekonomi adalah positif dan meyakinkan. Namun setelah adanya perubahan kebijakan ABK, pengaruh KKD terhadap pertumbuhan ekonomi semakin kecil.

c) *Pengaruh Struktur Belanja Daerah terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah*

Struktur belanja daerah diwakili oleh proporsi belanja publik atau belanja langsung. Semakin tinggi rasio belanja publik atau belanja langsung yang berupa kegiatan merupakan stimulan pemerintah daerah terhadap kegiatan swadaya masyarakat. Semakin besar proporsi belanja publik atau belanja langsung berarti stimulan dana kegiatan yang tersalur ke masyarakat lebih banyak dan lebih luas.

Belanja publik/belanja langsung itu menjadi motor penggerak kegiatan masyarakat termasuk pembangunan fisik dan sarana prasarana. Maka pengaruh struktur belanja daerah dalam penelitian ini adalah positif dan meyakinkan. Artinya kalau proporsi belanja publik meningkat maka pertumbuhan ekonomi akan meningkat dan sebaliknya jika proporsi belanja publik menurun akan mengancam turunnya pertumbuhan ekonomi.

d) *Perubahan Kebijakan ABK terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah*

Pertumbuhan ekonomi daerah berbeda secara meyakinkan saat sebelum Perubahan kebijakan ABK dengan sesudah, dimana setelah perubahan kebijakan ABK ada kecenderungan pertumbuhan ekonomi lebih tinggi. Namun demikian setelah IMABK ini diinteraksikan dengan KKD untuk mengetahui efektivitas perubahan kebijakan ABK didasarkan pada KKD.

Pada persamaan regresi baik model penerimaan maupun model pengeluaran menunjukkan bahwa perubahan kebijakan ABK (IMABK) kurang dapat meningkatkan efektivitas pengaruh KKD terhadap pertumbuhan ekonomi. Justru yang terjadi perubahan kebijakan ABK itu cenderung melemahkan pengaruh KKD terhadap pertumbuhan ekonomi.

PENUTUP

1. Kesimpulan

- a) Tingkat kemampuan keuangan daerah berpengaruh secara positif dan meyakinkan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah. Hal itu dapat diartikan bahwa jika tingkat kemampuan keuangan daerah meningkat maka pertumbuhan ekonomi daerah meningkat, sebaliknya jika tingkat kemampuan keuangan daerah menurun maka pertumbuhan ekonomi daerah menurun. Elastisitas pertumbuhan ekonomi didasarkan pada tingkat kemampuan ekonomi daerah adalah inelastik.
- b) Desentralisasi fiskal berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah. Pengaruh desentralisasi fiskal ini terhadap pertumbuhan ekonomi daerah membentuk *hump-shape relation*, baik pada model persamaan regresi penerimaan maupun model regresi pengeluaran. Hal itu berarti jika desentralisasi fiskal rendah berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi positif sampai titik tertinggi, dan setelah mencapai titik tertinggi maka pengaruh desentralisasi fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi negatif.
- c) Struktur belanja daerah berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah secara positif dan signifikan. Hal itu berarti jika proporsi belanja publik semakin besar maka berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi yang meningkat, dan sebaliknya jika proporsi belanja publik semakin kecil maka berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi menurun. Elastisitas pertumbuhan ekonomi didasarkan pada struktur belanja publik/belanja langsung adalah inelastik baik pada model regresi penerimaan maupun model regresi pengeluaran.
- d) Dengan adanya perubahan kebijakan Anggaran Berbasis Kinerja secara meyakinkan berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah. Nilai koefisien regresi positif itu menunjukkan bahwa setelah terjadi perubahan kebijakan Anggaran Berbasis Kinerja pertumbuhan ekonomi cenderung lebih tinggi dibandingkan dengan sebelum terjadi perubahan kebijakan Anggaran Berbasis Kinerja itu.
- e) Perubahan kebijakan Anggaran Berbasis Kinerja ternyata menurunkan efektivitas pengaruh kemampuan keuangan daerah terhadap pertumbuhan ekonomi daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah. Pengaruh Kemampuan Keuangan Daerah terhadap pertumbuhan ekonomi daerah tidak

semakin efektif ketika ada perubahan kebijakan Anggaran Berbasis Kinerja. Nilai negatif koefisien regresi itu menunjukkan bahwa pengaruh kemampuan keuangan daerah terhadap pertumbuhan ekonomi daerah pada masa setelah kebijakan Anggaran Berbasis Kinerja lebih melemah dibandingkan dengan sebelum adanya perubahan kebijakan Anggaran Berbasis Kinerja. Perubahan kebijakan Anggaran Berbasis Kinerja ternyata tidak dapat menguatkan efektivitas pengaruh Struktur Belanja Daerah terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Pengaruh interaksi antara variabel Kebijakan Anggaran Berbasis Kinerja dan Struktur Belanja Daerah terhadap pertumbuhan ekonomi daerah tidak signifikan.

2. Saran

- a) Kemampuan keuangan daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah perlu ditingkatkan lagi melalui komponen penentunya terutama peran Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai sumber pendapatan daerah. Hal ini dilakukan karena diyakini akan sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Laju peningkatan PAD dapat dilakukan dengan intensifikasi dan ekstensifikasi komponen-komponen PAD yang meliputi: (i) Pajak Daerah, (ii) Retribusi Daerah, (iii) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, dan (iv) Lain-lain PAD yang Sah.
- b) Struktur Belanja Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah perlu ditingkatkan karena semakin tinggi rasio belanja publik atau belanja langsung maka pertumbuhan ekonomi daerah akan semakin meningkat dan sebaliknya. Untuk itu disarankan Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah untuk senantiasa mengusahakan proporsi belanja publik atau belanja langsung semakin besar dengan melakukan efisiensi belanja tidak langsung berupa: (i) Belanja Pegawai (Gaji dan Tunjangan), (ii) Belanja Hibah, (iii) Belanja Bantuan Sosial, (iv) Belanja Bantuan Keuangan, (v) Belanja Tidak Terduga, dan (vi) Belanja Daerah Tidak Langsung Lainnya.

Daftar Pustaka

- Abdul Halim, 2001, *Bunga Rampai Manajemen Keuangan Daerah*, Yogyakarta: UPP-AMP UKPN.
- Achmad Lutfi, 2002, *Pemanfaatan Kebijakan Desentralisasi Fiskal Berdasarkan UU No. 34/2000 oleh Pemda untuk menarik Pajak Daerah dan Retribusi Daerah: Suatu Studi di Kota Bogor*.
- Afia Boadiwaa Yamoah, 2007, *The Effects of Fiscal Decentralization on Economic Growth in US Counties*, Dissertation in the Graduate School of The Ohio State University.
- ArmidaS.Alisjahbana, 2000, *Desentralisasi Fiskal dan Kebijakan Pembangunan Ekonomi Daerah*, Makalah disampaikan pada Seminar Ekonomi Science Club STIE YPKP dengan tema "Prospek Perekonomian Indonesia ditinjau dari Perkembangan Dunia Perbankan, Pasar Modal dan Sektor Riil dalam Tatanan Indonesia Baru, 6 Mei 2000.
- Atsushi Iimi, 2004, *Decentralization and Economic Growth Revisited: AN Empirical Note*, Japan Bank for International Cooperation.
- AyodeleJimoh, 2003, *Fiscal Federalism The Nigerian Experience*, Economic Commission For Africa.
- BachrulElmi, 2002, *"Kebijakan Desentralisasi Fiskal Kaitannya dengan Hutang Luar Negeri Pemerintah Daerah Otonom"*, *Kajian Ekonomi dan Keuangan*, Volume 6, Nomor 4, 4 Desember 2002.
- Beatriz Carrillo Garcia, 2008, *"China's Fiscal Decentralization: Consequences for Promotion of Local Development"*, *Mexico y la Cuenca del Pacifico*, Vol. 11, num, 31/enero – abril de 2008.
- Bernard Dafflon, 2002, *Fiscal Decentralization*, Paper Prepared for Presentation at 13th Annual Conference on Public Budgeting and Financial Management, Washington DC.
- Bhenyamin Hoessein, 2004, *Kebijakan Desentralisasi*, *Jurnal Administrasi Negara* Vol.1, Nomor 62, Maret.
- Bobby Hamzar Rafinus, 2001, *"Desentralisasi Fiskal dan Manajemen Ekonomi Makro"*, *Majalah Perencanaan Pembangunan*, Edisi 23 Tahun 2001.
- Boediono, 2002, *Kebijakan Pengelolaan Keuangan Negara dalam rangka Pelaksanaan Azas Desentralisasi Fiskal*, Disampaikan pada Rapar Koordinasi Pendayagunaan Aparatur Negara Tingkat Nasional, Jakarta, 11 Pebruari 2002.
- Chih-hung Liu, 2007, *What Type of Fiscal Decentralization System has Better Performance?*, Doctor of Philosophy Desertation, Maryland University College Park.
- Daniel Treisman, 2006, *Fiscal Decentralization, Governance, and Economic Performance: A Reconsideration*, JEL H11, H30, H71, H77 University of California, Los Angeles.
- Danyang Xie, Heng-fo Zou and Hamid Davoodi, 1999, *Fiscal Decentralization and Economic Growth in The United States*, Academic Press, Washington DC.

- David A. Robalino, Oscar F. Picazo, Albertus Voetberg, 2001, *Does Fiscal Decentralization Improve Health Outcomes? Evidence from a Cross-Country Analysis*.
- Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah, Depkeu RI, 2004, *Bunga Rampai Desentralisasi Fiskal*, Jakarta.
- Ehtisham Ahmad, Li Keping and Thomas Richardson, 2000, *Conference on Fiscal Decentralization Recentralization in China?*.
- Eny Prihatiyani, 2007, *Sosok dan Pemikiran: Anggaran DPRD Berbasis Kinerja*, Kompas, 03 Pebruari 2007.
- Erlangga Agustino Landiyanto, 2005, *Kinerja Keuangan dan Strategi Pembangunan Kota di Era Otonomi Daerah: Studi Kasus Kota Surabaya*, CURES Working Paper No. 05/01, January 2005.
- Ernesto Stein, 1998, *Fiscal Decentralization and Govenment Size in Latin America*, Inter-American Development Bank, Washington, DC.
- Esther Sri Astuti S.A dan Joko Tri Haryanto, 2006, *Studi Analisis Dampak Desentralisasi Fiskal Terhadap Pelayanan Sektor Publik*, Makalah Disampaikan pada Kongres XVI ISEI "Meletakkan Kembali Dasar-dasar Pembangunan Ekonomi yang Kokoh", Manado Convention Centre, 18 – 20 Juni 2006.
- F. Javier Arze del Granado, Jorge Martinez-Vazquez, Robert McNab, 2005, *Fiscal Decentralization and The Functional Composition of Public Expenditures*, Working Paper 05-01, Andrew Young School of Policy Studies George State University.
- Fritz Breuss, Markus Eller, 2004, *Fiscal Decentralization and Economic Growth: Is There Really A Link?. Journal for Institutional Comparisons, Vol. 2, No. 1. Vienna*.
- Geoffrey Garrett and Jonathan Rodden, 2001, *Globalization and Fiscal Decentralization*, Prepared for delivery at the Conference: Globalization and Governance, La Jolla, CA, March, 20-21.
- Govinda Rao, 2001, *Challenges of Fiscal Decentralization in Transitional Economies: An Asian Perspective*, Georgia State University, Andrew Young School of Policy Studies, Atlanta.
- Gujarati dan Porter, 2009, *Dasar-Dasar Ekonometrika*. Jakarta: Salemba Empat.
- Hamid Davoodi and Heng-fu Zou, 1998, *Fiscal Decentralization and Economic Growth: A Cross-Country Study*, Academic Press, Washington, DC. →Journal of Urban Economics 43 (2): 244-57.
- Hehui Jin, Yingyi Qian and Barry R. Weingast, 1999, *Regional Decentralization and Fiscal Incentives: Federalism, Chinese Style*, The American Economic Meeting, Chicago, January 3.
- Heidi Jane M. Smith, 2008, *Latin American Decentralization for the 21st Century*, Paper prepared for The XXVIII Annual ILASSA Student Conference: February 7 – 8, 2008.
- MudrajatKuncoro, 1995, "DesentralisasiFiskal di Indonesia", *Prisma*, 4 April 1995.

- Muhammad Zilal Hamzah, 2005, *Does Block Grant Generates Economic Growth on Province-Level in Indonesia After The Implementation of Fiscal Decentralization Policy?*. Makalah pada Simposium Riset Ekonomi II, 23 – 24 November 2005, Surabaya.
- Nehemiah E. Osoro, 2003, *Institutions, Decentralization and Growth*, Economic Commission for Africa, UNCC, Adis Ababa.
- Nirvikar Singh, 2007, *Fiscal Decentralization in China and India: Competitive, Cooperative or Market Preserving Federalism?*, Departement of Economics and Santa Cruz Center for International Economics University of California, Santa Cruz.
- Nobuo Akai and Masayo Sakata, 2001, *Fiscal Decentralization Contributes to Economic Growth: Evidence from State-level Cross-section Data for The United States*, Journal of Urban Economics 52, p. 93 – 108.
- Osung Kwon, 2002, *The Effects of Fiscal Decentralization on Public Spending: The Korean Case*, Paper Prepared for Presentation at 13th Annual Conference on Public Budgeting and Financial Management, Washington DC.
- Philip Bodman and Kathryn Ford, 2006, *Fiscal Decentralization and Economic Growth in the OECD*, Macroeconomics Research Group.
- Raj M. Desai, Lev M. Freinkman, Itzhak Goldberg, 2003, *Fiscal Federalism and Regional Growth Evidence from The Russian Federation in The 1990s*, Worldbank Policy Research Working Paper 3138.
- Remy Prud' humme, 2001, *Fiscal Decentralization and Intergo-vernmental Fiscal Relations*, Papers for The 2001 Cape Town Symposium.
- Richrad M. Bird, 2003, *Asymmetric Fiscal Decentralization: Glue or Solvent?*, Working Paper 03-09, Andrew Young School of Policy Studies George State University.
- Robert D. Ebel and Serdar Yilmaz, 2001, *Concept of Fiscal Decentralization and Worldwide Overview*, Presented on International Symposium Quebec Commission on Fiscal Imbalance, Quebec City, Quebec, September 13 and 14, 2001.
- Tjahjanudin Domai, 2002, *Reinventing Keuangan Daerah (Studi tentang Pengelolaan Keuangan Daerah)*, Jurnal Administrasi Negara, Volume II Nomor 02 Maret 2002.
- _____, 2003, *Anggaran Kinerja Bagi Pemerintah Daerah*, Artikel Tinjauan Buku *Performance Budgeting for State and Local Government*, by Janet M. Kelly and William C. Rivenbark.
- Yoenanto Sinung Nugroho dan Lana Soelistianingsih, 2007, *Analisis Disparitas Pendapatan Kabupaten/Kota di Propinsi Jawa Tengah dan Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pertumbuhan Ekonomi Regional*, Makalah Pada Seminar Ekonomi Nasional IV, Jakarta, 13 Desember 2007.
- Ulrich Thieben, 2000, *Fiscal Federalism in Western European and Selected Other Countries: Centralization or Decentralization? What is better for economic growth?*, Discussion Paper No. 224 Deutsches Institut für Wirtschaftsforschung, Berlin.

- _____, 2001, *Fiscal Decentralization and Economic Growth in High-Income OECD Countries*, European Network of Economic Policy Research Institutes (ENEPRI) Working Paper No.1/January 2001, Berlin, German.
- Xiaobo Zhang, 2005, *Fiscal Decentralization and Political Centralization in China: Implications for Regional Inequality*, Development Strategy and Governance Division, International Food Policy Research Institute, DSGD Discussion Paper Nomor 21, Washington.
- Xin-Qiao Ping and Jie Bai, 2005, *Fiscal Decentralization and Local Public Good Provision in China*, China Center for Economic Research, Beijing.

